



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2010-2011**

**SENIN, 9 MEI 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2010-2011**

**SENIN, 9 MEI 2011**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,  
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,  
Sidang Dewan yang terhormat,**

Hari ini 9 Mei, Dewan memasuki Masa Persidangan IV Tahun 2010-2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011, meliputi 49 hari kerja atau 68 hari kalender. Dalam Masa Persidangan IV Tahun 2010-2011, Dewan tetap melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dewan akan fokus pada pembahasan berbagai RUU, mengingat banyak RUU yang harus dapat diselesaikan pada Masa

Sidang ini, utamanya pada RUU-RUU yang telah menjadi target penyelesaian. Adapun fungsi anggaran, dititikberatkan pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2012. Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, beberapa Tim Pengawas akan terus melanjutkan tugas.

Sebelum melanjutkan Pidato Pembukaan ini, Pimpinan memberitahukan adanya 3 (tiga) surat masuk, yaitu 2 (dua) surat dari Presiden, masing-masing tentang pengusulan Calon Ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan tahun 2011-2015 dan pengusulan Calon Anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI periode 2011-2016. Dan surat dari Ketua BPK-RI perihal Penggantian Antar Waktu Anggota BPK. Ketiga surat tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebagai pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Sidang III yang lalu, Dewan baru dapat menyelesaikan 4 (empat) RUU untuk disahkan menjadi UU. Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Informasi Geospasial, RUU tentang Akuntan Publik, dan RUU tentang Transfer Dana. Oleh karena itu, Dewan masih harus bekerja keras menyelesaikan beberapa RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I.

Ada sebanyak 17 (tujuh belas) RUU, masing-masing 14 (empat belas) RUU inisiatif DPR dan 3 (tiga) RUU inisiatif Pemerintah yang diharapkan akan diselesaikan pada Masa Sidang IV ini. RUU tersebut antara lain: RUU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU tentang Mata Uang, RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Intelijen Negara, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Untuk RUU tentang BPJS, Dewan menagih komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan penyelesaian dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, untuk mengatur jaminan sosial, kesehatan masyarakat, dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

Dalam pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum, masih ada satu pasal yang krusial yaitu mengenai pembentukan Komisi Nasional Bantuan Hukum (Komnas Bankum). Pemerintah masih berpendirian masuk ke dalam organ Pemerintah sedangkan DPR menganggap hal tersebut berada di luar Pemerintah. Untuk RUU Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), pasal krusial adalah masalah penggantian antar waktu Hakim Konstitusi yang masih belum ada kesepakatan. Adapun di dalam RUU Mata Uang, hal yang masih diperdebatkan mengenai waktu

pelaksanaan dan pemberlakuan rupiah baru yang bertandatangan Bank Indonesia dan Pemerintah. Tentang RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebenarnya pembahasannya “tinggal senafas” untuk diselesaikan, yaitu satu pasal yang mengatur mengenai komposisi dan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK. Lobi yang dilakukan antara fraksi-fraksi DPR dan pemerintah, belum mendapatkan titik temu. Pada RUU Rumah Susun, terdapat beberapa substansi krusial yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, antara lain asas pemisahan horizontal, kepemilikan oleh orang asing, masalah pengawasan, peningkatan kualitas dan badan/kelembagaan. Adapun RUU tentang Intelijen Negara, belum ada kesamaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) antara DPR dan Pemerintah.

Pimpinan Dewan mengharapkan agar berbagai substansi krusial dalam pembahasan RUU di atas dapat segera dicarikan jalan keluar, melalui intensitas lobi, baik antar fraksi DPR maupun antara DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, berbagai RUU tersebut dapat segera diselesaikan dan diambil keputusan dalam Masa Persidangan ini.

Pelaksanaan fungsi legislasi ini senantiasa dipantau oleh publik, dan selama ini Dewan sering menerima kritik tajam atas rendahnya kinerja pelaksanaan fungsi legislasi. Oleh karena itu, Pimpinan meminta alat-alat kelengkapan Dewan, yaitu Komisi-

Komisi, Baleg dan Pansus, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi ini dan menghasilkan produk legislasi yang berpihak kepada rakyat.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selain monitoring terhadap pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011 oleh Komisi-Komisi DPR-RI, maka untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, Dewan menjadwalkan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 20 Mei akan dilakukan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN oleh Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, Kebijakan Umum, dan Prioritas Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah diagendakan pada Rapat Paripurna berikutnya. Hasil Pembicaraan Pendahuluan ini akan dijadikan masukan oleh pemerintah bagi penyusunan RUU APBN tahun 2012 dan nota keuangannya setelah melalui persetujuan Rapat Paripurna DPR.

Satu hal yang harus diperhatikan, baik oleh Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran, adalah bahwa dalam pembahasan anggaran dengan Pemerintah, hendaknya para Anggota Dewan

**memahami betul dasar pengalokasian yang tepat** sehingga anggaran dalam APBN dapat terukur, terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan, yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN, dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, diharapkan akan menyebabkan bergerakaknya sektor ekonomi, sehingga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran akan dapat diatasi, sehingga secara otomatis angka kemiskinan dapat dikurangi. Asumsi-asumsi dasar dalam ekonomi makro, seperti PDB (Produk Domestik Bruto), tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, tingkat suku bunga, harga minyak, dan produksi/lifting minyak mentah, semua ini akan menentukan besaran APBN, yang akan mulai dibahas oleh Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR-RI.

Dewan akan terus memantau perkembangan nilai tukar Rupiah. Berdasarkan informasi Bank Indonesia, apresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 3,16% (Rp. 8.675 per US\$), bahkan diprediksi akan

terus menguat bisa menembus angka Rp. 8.500. Ini yang terkuat dalam tujuh tahun terakhir, dan merupakan peningkatan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Jika dikaitkan dengan asumsi makro dalam penyusunan APBN tahun 2011, patokan nilai tukar Rupiah sebesar Rp. 9.250 perlu dilakukan *adjustment* terhadap angka APBN tahun 2011.

Terapresiasinya nilai tukar Rupiah akan berdampak langsung pada arus perdagangan Indonesia. Dewan menekankan agar otoritas moneter dan pengelola kebijakan fiskal harus memantau terus pergerakan nilai tukar rupiah. Penguatan ini merupakan respon positif bagi APBN kita. Namun demikian, Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak menguat terlalu cepat, karena penguatan yang terlalu cepat, berpotensi menekan ekspor Indonesia dan berdampak negatif terhadap fundamental ekonomi makro.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Mencermati perkembangan ekonomi internasional dewasa ini, Dewan mengajak Pemerintah segera mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi situasi ekonomi dan moneter di Eropa. Langkah Pemerintah mengantisipasi krisis keuangan di Eropa ini penting, mengingat negara-negara Eropa Barat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Antisipasi ini juga amat penting, mengingat perekonomian Jepang yang menjadi mitra dagang utama Indonesia masih belum pulih setelah mengalami musibah gempa bumi dan tsunami tanggal 11 Maret lalu.

Pada bagian lain, kalangan Dewan menyoroti perdagangan luar negeri Indonesia terkait dengan satu tahun berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Dewan sangat prihatin dengan semakin terdesaknya industri tradisional kita yang kalah bersaing dengan produk sejenis dari China. Di satu sisi perdagangan bebas memang menguntungkan bila produk industri kita mampu bersaing dengan negara lain. Tetapi di lain sisi, penciptaan kawasan perdagangan bebas dapat menjadi petaka bagi kita semua, bila produk perdagangan kita belum mampu bersaing seperti yang terjadi saat ini. Karena itu, Dewan mendesak Pemerintah agar di masa depan lebih berhati-hati dalam menyikapi keinginan negara-negara lain untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia terhindar menjadi obyek atau pasar perdagangan bebas negara lain.

Dalam kaitan ini, pada waktu Delegasi DPR-RI berkunjung ke China dan melakukan pembicaraan, antara lain dengan Perdana Menteri China, Ketua Parlemen China, diperoleh hasil positif bahwa pihak China sangat terbuka untuk meningkatkan hubungan

perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, dan perlu adanya keseimbangan dalam hal neraca perdagangan antar kedua negara.

Kedatangan Perdana Menteri China Wen Jiabao ke Indonesia, seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk bicara tegas, mengambil solusi bagi implementasi ACFTA dengan tetap memperhatikan koridor kerjasama bilateral.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pemberlakuan pembatasan subsidi BBM belum tuntas dibahas oleh Komisi VII DPR. Komisi VII memberikan catatan bahwa kepada fraksi-fraksi dan Menteri ESDM diminta mempelajari hasil kajian Tim, untuk selanjutnya dipresentasikan kembali ke Komisi VII dalam Forum Rapat Kerja Komisi pada masa sidang ini. Dewan mengharapkan, agar pembatasan subsidi BBM yang akan diterapkan, harus terukur dan tepat guna. Pada saatnya, Pemerintah harus secara terbuka memberikan penjelasan kepada masyarakat, agar masyarakat memahaminya, dan menghindari gejolak sosial yang diakibatkannya.

Pembatasan subsidi BBM ini, di satu pihak memang perlu dilakukan supaya angka subsidi tidak membengkak dan memberatkan APBN, namun di lain pihak, dalam menerapkan

berbagai kebijakan, Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada bulan-bulan terakhir ini, banyak masalah berkembang yang menjadi perhatian kita dan masyarakat Indonesia umumnya. Permasalahan di bidang politik, keamanan, sosial kemasyarakatan dan berbagai masalah lain, perlu ditindaklanjuti oleh Dewan untuk mendapat solusi yang tepat.

Bentrokan yang telah terjadi antara sekelompok masyarakat petani di Kebumen Selatan dan TNI baru-baru ini, telah dibahas oleh Komisi I menjelang berakhirnya masa reses. Hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, memberikan catatan yang perlu disampaikan: Komisi I memahami penjelasan yang disampaikan secara terbuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan status tanah latihan TNI yang berdampak pada terjadinya insiden bentrokan. Komisi I akan melakukan pembahasan pada masa sidang ini, untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan status tanah negara yang digunakan sebagai wilayah latihan TNI dan tanah negara yang dikelola TNI. Dalam kasus ini, perlu ditekankan penerapan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian masalah sengketa tanah.

TNI harus meningkatkan upaya kehumasannya untuk menghadirkan pemberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada.

Pada bagian lain, Dewan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian RI menumpas gembong teroris yang sempat membuat masyarakat Indonesia resah dan khawatir. Kendati demikian, rasa aman yang dirasakan masyarakat, tidak berlangsung lama. Beberapa pekan yang lalu, kembali masyarakat Indonesia dibuat cemas dengan ulah para teroris, dimulai dari teror bom buku, aksi bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro Cirebon, dan terakhir rencana pengeboman di Gereja Christ Cathedral.

Masyarakat kita sekarang ini, juga semakin dikhawatirkan dengan gencarnya upaya kelompok yang menamakan dirinya Negara Islam Indonesia atau NII, yang pada prakteknya ingin mengganti NKRI menjadi Negara Islam. Kita tentunya sangat prihatin, bahwa Agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, dijadikan alat untuk melakukan separatisme, terutama dengan mempengaruhi atau mengindoktrinasi generasi muda kita dengan paham Islam yang diselewengkan demi tujuan pribadi atau golongan NII itu sendiri.

Indoktrinasi dilakukan dengan cara-cara merusak moral dan mental generasi muda bangsa kita. Terhadap hal tersebut, dengan tegas kita katakan, seluruh Bangsa Indonesia harus yakin bahwa

**Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara kita yang sudah final**, merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* beserta seluruh perwakilan rakyat Indonesia ketika negeri ini didirikan. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia harus mempertahankannya.

Beberapa anggota Dewan berpendapat bahwa, keberadaan NII merupakan organisasi sesat. Selain jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, juga bertentangan dengan nilai-nilai/kaidah Islam. Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran agar kelompok ini tidak berkembang liar menjadi bahaya laten bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan membubarkan dan membasmi kelompok NII tersebut. Kami khawatir NII telah masuk hampir di semua lini, seperti kampus, birokrasi dan menyusup ke partai-partai politik. Karena itu, gerakan NII harus segera ditindak tegas.

Pemberantasan terorisme dan kelompok NII harus dilakukan oleh TNI, Kepolisian, aparat intelijen secara komprehensif dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, dan potensi yang dapat mengancam keutuhan NKRI dapat dikikis.

Saya menghimbau agar orang tua, pendidik, tokoh masyarakat dan pemuka agama, untuk senantiasa memberikan pemahaman yang tepat dan baik tentang Islam dan dalam

hubungannya dengan Pancasila dalam kerangka NKRI. Sehingga anak-anak kita, generasi muda kita tidak akan mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin sesat yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Fungsi pengawasan Dewan, akan dilakukan dengan intensitas tinggi khususnya berkaitan dengan hasil kunjungan kerja Komisi-Komisi Dewan ke daerah dan adanya temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti pada saat anggota Dewan bertemu dengan konstituen. Masih adanya gedung-gedung sekolah yang roboh, masyarakat miskin yang kekurangan pangan dan gizi, tidak mampu berobat, dan tidak tersedianya fasilitas kesehatan di rumah sakit bagi orang miskin, semua ini memerlukan perhatian serius dari Dewan, sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi Dewan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Dalam kaitan pengawasan ini, beberapa Tim Pengawas yang telah dibentuk DPR masih terus melanjutkan tugasnya dalam Masa Sidang IV ini. Tim Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi masih melanjutkan tugasnya, utamanya tindak lanjut atas pemulangan TKI yang terlantar di Arab Saudi. Tim Khusus telah meminta Pemerintah untuk melakukan pengetatan penempatan TKI informal yang bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga ke Arab Saudi. Tim ini telah melakukan evaluasi

keberadaan TKI bermasalah. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Khusus DPR harus menjadi masukan bagi Pemerintah, agar ke depan dalam kebijakan pengiriman TKI lebih berorientasi kepada **peningkatan penempatan TKI yang berkualitas serta bermartabat.**

Dengan banyaknya masalah TKI, terutama *overstayers* di Arab Saudi, maka perlu ada pembenahan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dalam membantu Pemerintah dalam proses perekrutan dan penempatan TKI. Para calon TKI sudah harus siap bekerja, sekaligus memahami hukum dan budaya di negara dimana mereka ditempatkan.

Rencana penandatanganan perbaikan nota kesepahaman mengenai tenaga kerja sektor domestik antar Indonesia dan Malaysia, yang akan dilakukan pada pertengahan bulan ini, dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi TKI yang bekerja di negara tersebut. Kesepakatan ini seyogyanya juga dapat diterapkan dengan negara-negara penerima yang masih diwarnai dengan berbagai masalah, terutama negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk (GCC/Gulf Cooperation Council GCC), termasuk Arab Saudi yang merupakan negara tujuan utama para TKI sektor informal. Seiring dengan itu, Dewan akan segera membahas draf revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini marak kembali, telah menjadi perhatian Komisi XI. Kejahatan perbankan telah mencederai dunia perbankan Indonesia yang sekarang sedang tumbuh kembang dengan pesat dalam ikut memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejak akhir 2010 sampai awal Kwartal II tahun 2011, Polda Metro Jaya melaporkan telah menangani 8 (delapan) pembobolan Bank dan 30 (tigapuluh) orang sudah menjadi tersangka, termasuk kasus di Citibank dan Bank Mega dalam kasus rekening deposito PT. Elnusa (tbk).

Dampak kejahatan perbankan tentu sangat dirasakan oleh pihak nasabah, pihak bank, dan dikhawatirkan menstimulasi dampak sistemik pada perekonomian secara umum akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Bank mestinya bisa menjadi lembaga keuangan yang selalu *prudent* terhadap wilayah internal dan eksternal, yang dalam pengelolaannya dibutuhkan kepercayaan masyarakat.

Kasus-kasus kejahatan perbankan terjadi, selain karena lemahnya penerapan pada manajemen resiko, juga karena rendahnya profesionalisme dan komitmen beberapa karyawan terhadap etik lembaganya.

Dalam kasus Citibank, BI telah menjatuhkan sanksi atas dua kesalahan yang dilakukannya. Penjatuhan sanksi kepada Citibank telah benar. Kita berharap, perbankan pada umumnya, harus belajar pada kasus ini dalam rangka memperkuat prinsip *prudential* dan *responsible lending*, agar kasus semacam ini tidak terjadi di perbankan lainnya.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam kaitan dengan masalah pendidikan, Dewan dipastikan akan membahas tentang pelaksanaan Ujian Nasional yang masih akan berlangsung hingga tanggal 12 Mei mendatang. Pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini masih diwarnai dengan beberapa masalah, seperti kurangnya jumlah soal, dana bantuan operasional yang belum diterima sekolah, sekolah yang belum mengirimkan nilai yang dibutuhkan dalam pembobotan nilai akhir, dan terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan ujian, sehingga perlu pengulangan untuk beberapa sekolah.

Wacana menjadikan Ujian Nasional sebagai tiket masuk Perguruan Tinggi, memang perlu dibahas lebih mendalam dengan Pemerintah. Ujian Masuk Perguruan Tinggi merupakan tes prediksi keberhasilan calon mahasiswa, sedangkan Ujian Nasional mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dijalani. Oleh karena itu, perlu ditentukan kebijakan yang tepat mengenai masalah ini.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Konferensi Tingkat Tinggi Ke-18 ASEAN di Jakarta yang dihadiri oleh kepala-kepala Pemerintahan di Kawasan ASEAN, telah berlangsung sejak 7 Mei, kemarin telah berakhir. KTT ASEAN merupakan pertemuan akbar, membahas sejumlah isu seputar tiga pilar ASEAN menuju percepatan pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015. Tiga pilar tersebut adalah, politik-keamanan, ekonomi, serta sosial-budaya. KTT ini juga memiliki arti penting, karena ada sesi khusus dialog antara Kepala-Kepala Pemerintahan ASEAN dengan Ketua-Ketua Parlemen Negara-Negara ASEAN.

Di bawah kepemimpinan Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN untuk tahun 2011, diharapkan ASEAN makin solid dalam membangun kerjasama di antara para anggotanya. Eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional yang sudah matang, dan yang sedang membangun komunitas bersama, akan dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan kawasan.

Dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, DPR-RI telah menghadiri beberapa pertemuan internasional, di antaranya sidang Inter-Parliamentary Union ke 124 di Panama. Dalam sidang ini Indonesia berhasil menggolkan *emergency item* mengenai *Strengthening Democratic Reform in Emerging Democracies, Including North Africa and The Middle East*. Indonesia menekankan,

bahwa usulan *emergency item* tersebut dilakukan dalam upaya mendukung reformasi demokrasi, khususnya bagi negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah.

Dalam kaitan kepemimpinan Indonesia di Kelompok Geopolitik Asia-Pasifik, DPR-RI akan menyelenggarakan *working group* IPU untuk Parlemen Asia-Pasifik pada awal Juli nanti, untuk menyatukan pandangan Parlemen Asia Pasifik untuk mewarnai IPU melalui modernisasi Strategic Plan IPU.

Atas undangan Ketua Parlemen Irak, beberapa hari yang lalu, Ketua DPR-RI telah memimpin Delegasi DPR-RI ke Irak. Kunjungan ini memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara, khususnya kedua parlemen. Delegasi DPR-RI telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Urusan Minyak, Ketua Majelis Tinggi Islam dan beberapa tokoh Irak. Ketua DPR berkesempatan menyampaikan pidato di depan anggota Parlemen Irak, mengkampanyekan perkembangan kehidupan berdemokrasi yang telah berjalan di Indonesia, khususnya di era reformasi.

Kunjungan Delegasi DPR-RI ke Irak memiliki hasil yang positif bagi kepentingan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kerjasama di bidang pertambangan, karena Irak memiliki potensi besar di bidang Migas.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada Masa Reses Persidangan DPR, beberapa Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka mendapatkan masukan bagi pembahasan dan penyelesaian RUU yang sedang ditangani. Kunjungan kerja ke luar negeri, sering mendapatkan kritik dari masyarakat, LSM, dan berbagai pihak, termasuk yang disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Swiss. Kita menghargai berbagai kritik yang disampaikan. Pimpinan berpendapat bahwa Kunjungan Kerja ini masih dibenarkan, tetapi harus sesuai dengan urgensi dan kemanfaatan, dengan terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan dan disosialisasikan kepada publik.

Dewan berharap, setiap kritik yang disampaikan kepada Dewan, harus memiliki argumentasi yang jelas, proporsional, dan disampaikan melalui mekanisme yang benar. Kiranya, berbagai kritik ini menjadi masukan bagi Dewan dalam mengemban tugas konstitusionalnya.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 ini kami sampaikan. Kepada para anggota, Pimpinan mengingatkan kembali bahwa kita telah memiliki Kode Etik yang baru, yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam kita bersikap, berperilaku, melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa menjalankan segala amanah yang diberikan kepada kita sebagai wakil rakyat. Amin. Selamat Bekerja.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

KETOK 3 X
-----------

Jakarta, 9 Mei 2011

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**DR. H. MARZUKI ALIE**